

MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK NEGERI (BUMNEG) DI KECAMATAN LEITIMUR SELATAN

MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMNEG) IN SOUTH LEITIMUR DISTRICT

Jusyan Dona Kailuhu¹, Felecia. P. Adam¹, Marfin Lawalata²

¹Program Studi Penyuluhan Pertanian,

²Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian,
Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura Putuhena,
Jln. Ir. M. Kampus Poka, Ambon – 97233

E-mail : *kailuhudona@gmail.com*
adamfelecia2@gmail.com
marfinlawalata@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) di Kecamatan Leitimur Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengurus BUMNeg dan Pemerintah Negeri dari yang Negeri Hutumuri, Rutong, Leihari, Hukurila, Ema, Kilang dan Hatalae sebanyak 14 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen BUMNeg di kecamatan Leitimur Selatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sudah berjalan dengan baik namun khusus untuk Negeri Hatalae kurang maksimal di aspek perencanaan.

Kata kunci: BUMNeg; Manajemen.

Abstract

This study aims to determine the implementation of management functions in the management of village enterprises (BUMNeg) in South Leitimur District. This research is a qualitative study that aims to understand the phenomena experienced by research subjects in the field using observation, interview and documentation techniques. The sample was taken using purposive sampling technique, namely the BUMNeg management and the village Government from Hutumuri, Rutong, Leihari, Hukurila, Ema, Kilang and Hatalae village as many as 14 respondents. The results of this study indicated that BUMNeg management in South Leitimur District, which includes planning, organizing, directing and supervising is working well but specifically for Hatalae village, the planning aspect is not optimal.

Keywords: BUMNeg; Management.

Pendahuluan

Manajemen adalah cara untuk perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan penggambaran anggota organisasi dan penggunaan seluruh aset organisasi untuk mencapai impian organisasi yang telah ditetapkan (Suprihanto, 2014). Indonesia sangat berpengaruh besar dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membiayai segala macam kebutuhan khususnya pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat umum (Dahrani dan Ramadhan, 2021). Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 (Berutu, 2018). Selain itu, pembangunan juga memiliki tujuan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan Negeri. Untuk mendukung pembangunan nasional tentunya harus diikuti oleh pembangunan di Negeri.

Salah satu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah BUMNeg. Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) merupakan badan keuangan Negeri yang didirikan dan dimiliki melalui perangkat Negeri, dikendalikan secara ekonomi, mandiri dan profesional dengan modal semua atau sebagian besar aset Negeri yang telah dipisahkan. Keberhasilan pembangunan di suatu negara bukan hanya tanggung jawab Pemerintah juga menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai bagian dari negara, sehingga realisasi tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan Negeri (Dahrani, 2021). Merujuk pada buku panduan BUMNeg (2007) “Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) adalah lembaga usaha Negeri yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Negeri dalam upaya memperkuat perekonomian Negeri dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Negeri”. Kemudian akan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha (usaha yang dikelola oleh BUMNeg), pembangunan Negeri seperti pemberdayaan masyarakat Negeri, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah,

bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri. 3 Keberadaan BUMNeg di Negeri-Negeri diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan program-program yang sesuai dengan potensi Negeri.

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan bahwa pasca disahkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Negeri, pertumbuhan BUMNeg sendiri mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di tahun 2014, jumlah BUMNeg tercatat sebanyak 8.189 unit. Jumlah ini kemudian meningkat drastis menjadi 51.134 unit pada tahun 2020, Terlihat dalam data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Provinsi Maluku, BUMNeg di Provinsi Maluku baru mulai berkembang pada tahun 2016. Untuk BUMNeg di Provinsi Maluku itu sendiri tercatat ada 890 unit kegiatan BUMNeg yang tersebar dari 1198 Negeri, dan BUMDes yang paling sedikit terdapat di Kota Ambon dengan jumlah 26 unit dan hanya 23 unit yang berstatus aktif pada tahun 2023 dan juga jumlah BUMDes aktif terbanyak ada di Kecamatan Leitimur Selatan maka dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian: 1). Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) di Kecamatan Leitimur Selatan. 2). Untuk mengetahui kendala yang membuat sampai unit usaha BUMNeg di Kecamatan Leitimur Selatan tidak aktif.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 7 Negeri yang ada di Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) Negeri Hutumuri, Negeri Rutong, Negeri Leahari, Negeri Hukurila, Negeri Ema, Negeri Kilang, Negeri Hatalai di Kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 14 orang. sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau pernyataan dari narasumber. Proses analisis

data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait Manajemen BUMNeg pada Negeri Hutumuri, Negeri Rutong, Negeri Leahari, Negeri Hukurila, Negeri Ema, Negeri Kilang, dan Negeri Hatalai.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Geografis

Luas daratan Kecamatan Leitimur Selatan sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Leitimur Selatan tercatat seluas 50,50 km². Negeri Hutumuri dengan luas 15,00 km² merupakan Negeri terluas di kecamatan ini, sementara Negeri Ema adalah negeri yang paling kecil wilayahnya, yaitu seluas 3,00 km².

Tabel 1. Luas Kecamatan Leitimur Selatan dirinci per Negeri

| Nama Negeri | Luas (Km2) |
|-------------|------------|
| Hutumuri | 15,00 |
| Rutong | 5,00 |
| Leahari | 5,00 |
| Hukurila | 7,50 |
| Ema | 3,00 |
| Kilang | 5,00 |
| Naku | 5,00 |
| Hatalae | 5,00 |

Sumber : BPS Maluku 2021

Kondisi Penduduk

Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2021 (SP 2021) (September) Tahun 2021 tercatat jumlah penduduk di Kecamatan Leitimur Selatan Sebanyak 9.677 jiwa, dengan komposisi 4.806 penduduk laki-laki dan 4.852 penduduk perempuan. Pada tahun 2021 Negeri Hutumuri masih tetap sebagai Negeri terpadat dengan jumlah penduduk 4.374 jiwa. Negeri Hukurila mejadi wilayah

yang berpenduduk paling sedikit dengan jumlah penduduk 639 jiwa.

Tabel 2. Distribusi Penduduk Kecamatan Leitimur Selatan Tahun 2021

| Nama Negeri | Jumlah (jiwa) | Persentase (%) |
|--------------|---------------|----------------|
| Hutumuri | 4374 | 45,20 |
| Rutong | 790 | 8,17 |
| Leahari | 669 | 6,91 |
| Hukurila | 639 | 6,60 |
| Ema | 803 | 8,30 |
| Kilang | 803 | 8,30 |
| Naku | 656 | 6,78 |
| Hatalai | 943 | 9,74 |
| Total | 9677 | 100,00 |

Sumber: BPS Maluku 2021

Manajemen BUMNeg Benteng Raja (Negeri Hutumuri)

1) Perencanaan (*Planning*)

BUMNeg Benteng Raja berdiri pada tahun 2018. Terdapat beberapa unit usaha yakni usaha BRI Link, warung makan, perikanan tangkap, ATK fotocopy dan print. Perencanaan dilakukan dengan beberapa proses yakni menetapkan tujuan, membuat prosedur dan membuat program. Usaha yang dikembangkan oleh BUMNeg Benteng Raja ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri serta memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Negeri sehingga tingkat pengangguran yang ada semakin berkurang. Dengan memajukan usaha-usaha yang sudah terbentuk untuk menambah kreatifitas masyarakat serta keikutsertaan masyarakat dalam membangun BUMNeg ini sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

Perencanaan yang dilakukan oleh BUMNeg sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan pihak BUMNeg dan masyarakat. Perencanaan yang baik harus dilakukan dan setidaknya mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk prosedur yang dilakukan adalah dengan mengaktifkan kembali 2 unit usaha yang sudah lama tidak berkembang lagi yaitu unit usaha perikanan tangkap dan unit usaha warung makan. Hasil wawancara dengan pengurus BUMNeg Benteng Raja dikemukakan bahwa ada rencana pengembangan unit

usaha baru yaitu Pom Bensin Mini.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Setiap kegiatan yang dilakukan dan dijalankan oleh pihak BUMNeg Benteng Raja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak pengelola BUMNeg. Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat negeri untuk membangun dan memajukan BUMNeg Benteng Raja sangat berperan penting dalam perekonomian negeri serta dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat setempat. Kerjasama yang dilakukan bukan hanya antara pengelola dan masyarakat saja melainkan harus disertai kerjasama oleh pemerintah Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Pengorganisasian dan kerjasama yang dilakukan oleh BUMNeg Benteng Raja dengan pemerintah negeri yaitu bapak raja selalu menjalin hubungan yang baik dengan pengurus BUMNeg agar mengetahui perkembangan BUMNeg. Pihak BUMNeg juga kurang dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang menyebabkan masyarakat merasa dibeda-bedakan dalam pengelolaan BUMNeg.

3) Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan merupakan fungsi dari manajemen yang saling berdampak dengan usaha memberikan bimbingan, arahan, perintah ataupun saran kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dengan dilakukan dengan baik maka tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. BUMNeg Benteng Raja telah melakukan pembimbingan dengan baik dengan berdiskusi pada saat rapat kerja tentang kendala yang dihadapi dan mencari solusi untuk pemasalahan yang ada. Rapat kerja dilakukan setiap 1 bulan sekali dan satu kali untuk rapat akhir tahunan dalam setahun, kepada anggotanya sehingga mengetahui apa yang menjadi kendala dan hambatan selama pengelolaan BUMNeg. Mengingat saat ini yang mengelola BUMNeg adalah campuran dari orang yang masih muda dan orang yang sudah tua dan masing-masing memiliki ego yang berbeda-beda dan tidak mau mengalah satu sama lain. Makanya ketua BUMNeg selalu mengingatkan bahwa dalam pengelolaan BUMNeg ini harus mengesampingkan egonya masing-

masing dulu agar BUMNeg yang ada di Negeri Hutumuri Bisa berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat negeri hutumuri.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Tujuannya adalah agar jangan sampai terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, BUMNeg Benteng Raja di Negeri Hutumuri yang sudah berjalan hampir 5 tahun ini sudah cukup berkembang meskipun hanya empat program yang berjalan. Raja selaku penanggung jawab BUMNeg yang ada di Negeri Hutumuri setiap bulan mengontrol langsung ke lapangan agar bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan permasalahan yang ada di BUMNeg. Sedangkan pengawas BUMNeg Benteng Raja mengawasi pengelolaan BUMNeg dan manajemen BUMNeg agar tidak terjadi penyimpangan. Setiap bulan Raja dan pengawas BUMNeg Benteng Raja melakukan evaluasi dengan anggota BUMNeg. Raja dan pengawas BUMNeg selaku penanggung jawab wajib melakukan pengawasan terhadap pengurus dalam pengelolaan BUMNeg dan manajemen BUMNeg sehingga BUMNeg yang ada di Negeri Hutumuri berjalan dengan baik dan dapat berkembang sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Negeri Hutumuri. Pemerintah Negeri juga ikut serta dalam pengawasan terutama meminta laporan keuangan setiap tahunnya terkait pemasukan dan pengeluaran selama pengelolaan BUMNeg.

Manajemen BUMNeg Rajunohitipori (Negeri Rutong)

1) Perencanaan (*Planning*)

BUMNeg Rajunohitipory berdiri sejak tahun 2018, dan terdapat beberapa unit usaha yakni toko kelontong (sembako), print dan perikanan tangkap. Pengurus BUMNeg memajukan usaha-usaha yang sudah terbentuk untuk menambah kreatifitas masyarakat serta keikutsertaan masyarakat dalam membangun BUMNeg ini sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Perencanaan yang dilakukan oleh BUMNeg sudah cukup baik sesuai dengan yang diharapkan pihak BUMNeg dan masyarakat. Perencanaan yang baik harus dilakukan dan setidaknya mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk

prosedur yang dilakukan adalah dengan menambahkan lagi jumlah sembako supaya masyarakat tidak berkekurangan lagi dalam membeli sembako.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam BUMNeg perlu untuk keberlangsungan BUMNeg itu sendiri tanpa adanya pengorganisasian yang baik maka para anggota BUMNeg tidak akan berhasil dalam pekerjaannya. Berdasarkan temuan peneliti, bahwa pengorganisasian dan kerjasama yang dilakukan oleh BUMNeg Rajunohitipory dengan pemerintah negeri yaitu bapak raja selalu menjalin hubungan yang baik dengan pengurus BUMNeg agar mengetahui perkembangan BUMNeg. Dan untuk sosialisasi, Pihak BUMNeg juga kurang dalam melakukan bersosialisasi dengan masyarakat yang menyebabkan masyarakat masih ada yang belum tau tentang unit-unit usaha apa yang ada di BUMNeg.

3) Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan merupakan fungsi dari manajemen yang saling berdampingan dengan usaha memberikan bimbingan, arahan, perintah ataupun saran kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dengan dilakukan dengan baik maka tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. BUMNeg Rajunohitiporry Rapat kerja dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk rapat akhir tahunan dalam setahun, kepada anggotanya sehingga mengetahui apa yang menjadi kendala dan hambatan selama 1 tahun pengelolaan BUMNeg.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Menurut Kasmir (2016) dalam bukunya mengatakan bahwa” kegiatan untuk mengawasi kegiatan yang sudah di rencanakan agar berjalan pada jalur yang telah disusun. BUMNeg Rajunohitipory di Negeri rutong dan Raja selaku Komisaris BUMNeg yang ada di Negeri Rutong setiap bulan mengontrol langsung ke lapangan agar bisa mengetahui apa yang menjadi kendala dan permasalahan yang ada di BUMNeg. Raja dan pengawas BUMNeg selaku penanggung jawab wajib mengotrol penuh dalam pengelolaan BUMNeg dan manajemen BUMNeg sehingga BUMNeg yang ada di Negeri Rutong berjalan dengan baik dan dapat berkembang sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat

Negeri Rutong.

Manajemen BUMNeg Lesa (Negeri Leahari)

1) Perencanaan (*Planning*)

BUMNeg Lesa di Negeri Leahari menjalankan tiga unit usaha yakni usaha sembako, fotocopy dan mesin pres. Perencanaan dilakukan dengan beberapa proses yakni menetapkan tujuan, membuat prosedur dan membuat program. Perencanaan yang akan dilakukan Pemerintah Negeri Leahari untuk BUMNeg Lesa yaitu Mengganti Pengurus yang lama dan akan menetapkan pengurus yang baru untuk mengelola BUMNeg Lesa ini agar dapat berkembang lebih baik kedepan

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Setiap kegiatan yang dilakukan dan dijalankan oleh pihak BUMNeg Lesa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak pengelola BUMNeg. Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat Negeri untuk membangun dan memajukan BUMNeg Lesa sangat penting dan berdampak pada perekonomian Negeri dan kehadirannya dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat setempat. Kerjasama yang dilakukan bukan hanya antara pengelola dan masyarakat saja melainkan harus disertai kerjasama oleh pemerintah Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian, pengorganisasian dan kerjasama yang dilakukan oleh BUMNeg Lesa dan masyarakat kurang maksimal, disebabkan karena ada beberapa pengelola BUMNeg tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga masyarakat pun enggan untuk bekerjasama dengan pihak pengelola.

3) Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan merupakan fungsi dari manajemen yang saling berdampak dengan usaha memberikan bimbingan, arahan, perintah ataupun saran kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dengan dilakukan dengan baik maka tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. BUMNeg Lesa telah

melakukan pembimbingan cukup baik dengan berdiskusi pada saat rapat kerja tentang kendala yang dihadapi dan mencari solusi untuk pemmasalahan yang ada. Rapat kerja dilakukan setiap setahun sekali. BUMNeg Lesa juga memotivasi anggota BUMNeg dan masyarakat untuk lebih giat dalam pengembangan BUMNeg agar tujuan yang sudah ditetapkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Dalam proses pengelolaan BUMNeg, pengurus melakukan pengawasan terhadap perkembangan-perkembangan usaha yang ada di BUMNeg Lesa ini. Dengan mengawasi unit usaha sembako, kalau ada yang kurang bisa menambahkan sembakonya lagi agar tidak kurang sembakonya pada saat masyarakat membeli. Laporan pembukuan juga dilakukan pemerintah Negeri dalam pengawasan BUMNeg. Akan tetapi pengawasan terhadap BUMNeg belum dilaksanakan secara optimal disebabkan karena pengurus tidak bekerja sesuai dengan wewenang yang sudah ditetapkan.

Manajemen BUMNeg Amanhuary (Negeri Hukurila)

1) Perencanaan (*Planning*)

BUMNeg Amanhuary di Negeri Hukurila memiliki satu unit usaha yang diusahakan yakni usaha pariwisata. Perencanaan dilakukan dengan beberapa proses yakni menetapkan tujuan, membuat prosedur dan membuat program. Perencanaan yang akan dilakukan oleh Pengurus BUMNeg Amanhuary yaitu memperbaiki peralatan menyelam yang sudah karat dan juga memperbaiki *home stay* untuk lebih baik lagi. Pengurus BUMNeg Amanhuary juga berencana ingin menambahkan satu unit usaha lagi yaitu unit usaha pom bensin mini.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Setiap kegiatan yang dilakukan dan dijalankan oleh pihak BUMNeg Amanhuary untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak pengelola BUMNeg. Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat Negeri untuk membangun dan memajukan BUMNeg

Amanhuary sangat berperan penting dalam perekonomian Negeri serta dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat setempat. Kerjasama yang dilakukan bukan hanya antara pengelola BUMNeg dan masyarakat saja melainkan harus disertai kerjasama oleh Pemerintah Negeri. Berdasarkan temuan peneliti, bahwa pengorganisasian dan kerjasama yang dilakukan oleh BUMNeg Amanhuary dan masyarakat sangat baik karena masyarakat sering membantu pengurus BUMNeg dalam membersihkan pantai pada saat pergantian musim dari musim timur ke musim barat.

3) Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan merupakan fungsi dari manajemen yang saling berdampingan dengan usaha memberikan bimbingan, arahan, perintah ataupun saran kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dengan dilakukan dengan baik maka tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. BUMNeg Amanhuary telah melakukan pembimbingan cukup baik dengan berdiskusi pada saat rapat kerja tentang kendala yang dihadapi dan mencari solusi untuk pemmasalahan yang ada. Rapat kerja dilakukan setiap 3 bulan sekali. BUMNeg Amanhuary juga memotivasi anggota BUMNeg dan masyarakat untuk lebih giat dalam pengembangan BUMNeg agar tujuan yang sudah ditetapkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Proses pengelolaan BUMNeg, pengurus melakukan bentuk pengawasan terhadap perkembangan-perkembangan usaha yang ada di BUMNeg Amanhuary ini. Pengurus BUMNeg mengawasi unit pariwisata, karena hanya 1 unit usaha jadi lebih gampang mengontrol unit usaha itu sendiri dan juga Laporan pembukuan juga dilakukan pemerintah Negeri dalam pengawasan BUMNeg.

Manajemen BUMNeg Embun (Negeri Ema)

1) Perencanaan (*Planning*)

BUMNeg Embun di Negeri Ema memiliki tiga unit usaha yakni usaha transportasi (*pickup*), sembako dan tempat pencucian motor. Perencanaan dilakukan dengan beberapa proses yakni menetapkan tujuan, membuat prosedur

dan membuat program. Perencanaan yang akan dilakukan yaitu ingin mengganti pengurus yang lama karena BUMNeg di Negeri Ema Sudah lama tidak jalan

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Setiap kegiatan yang dilakukan dan dijalankan oleh pihak BUMNeg Toulatu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak pengelola BUMNeg. Dengan keikutsertaan dan terlibatnya masyarakat Negeri untuk membangun dan memajukan BUMNeg Embun sangat berperan penting dalam perekonomian Negeri serta dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat setempat. Kerjasama yang dilakukan bukan hanya antara pengelola dan masyarakat saja melainkan harus disertai kerjasama oleh pemerintah Negeri. Berdasarkan temuan peneliti, bahwa pengorganisasian dan kerjasama yang dilakukan antara Pengurus BUMNeg Embun tidak baik karena sudah banyak pengurus yang tidak aktif lagi jadi kerjasamanya sudah tidak baik

3) Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan merupakan fungsi dari manajemen yang saling berdampingan dengan usaha memberikan bimbingan, arahan, perintah ataupun saran kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dilakukan dengan baik maka tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. BUMNeg Embun karena sudah lama tidak ada Rapat kerja yang dilakukan antara pengurus BUMNeg jadi perkembangan BUMNeg tidak baik

4) Pengawasan (*Controlling*)

Dalam proses pengelolaan BUMNeg, pengurus melakukan bentuk pengawasan terhadap perkembangan-perkembangan usaha yang ada di BUMNeg Embun ini. Dengan mengawasi unit-unit usaha yang ada di BUMNeg Embun. Laporan pembukuan juga dilakukan pemerintah Negeri dalam pengawasan BUMNeg. Akan tetapi, BUMNeg belum melakukan pengawasan secara optimal disebabkan karena hanya beberapa pengurus yang mengelola unit-unit usaha yang ada di BUMNeg Embun.

Manajemen BUMNeg Samasimalatu (Negeri Kilang)

1) Perencanaan (*Planning*)

BUMNeg Samasimalatu di Negeri Kilang memiliki dua unit usaha yakni usaha angkutan kota dan jasa keuangan . Perencanaan dilakukan dengan beberapa proses yakni menetapkan tujuan, membuat prosedur dan membuat program. Perencanaan yang akan dilakukan mengembangkan lagi kedua unit usaha ini agar bisa lebih baik dan berkembang lagi ke depan dan juga rencana dari pengurus BUMNeg Samasimalatu yaitu dalam waktu dekat akan menambahkan 1 unit usaha yaitu usaha air galun

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

BUMNeg Samasimalatu sangat berperan penting dalam perekonomian Negeri serta dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat setempat. Kerjasama yang dilakukan bukan hanya antara pengelola dan masyarakat saja melainkan harus disertai kerjasama oleh pemerintah Negeri. Berdasarkan temuan peneliti, bahwa pengorganisasian dan kerjasama yang dilakukan oleh BUMNeg Samasimalatu dan masyarakat cukup baik, karena masyarakat turut berpartisipasi dalam ke 2 unit usaha tersebut

3) Pengarahan (*Directing*)

Kegiatan yang dilakukan dan dijalankan oleh pihak BUMNeg Samasimalatu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak pengelola BUMNeg. Dengan keikutsertaan dan terlibatnya masyarakat Negeri untuk membangun dan memajukan BUMNeg Samasimalatu sangat berperan penting dalam perekonomian Negeri serta dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat setempat. Kerjasama yang dilakukan bukan hanya antara pengelola dan masyarakat saja melainkan harus disertai kerjasama oleh pemerintah Negeri.

Berdasarkan temuan peneliti, bahwa pengorganisasian dan kerjasama yang dilakukan oleh BUMNeg Samasimalatu dengan pemerintah negeri yaitu bapak raja selalu menjalin hubungan yang baik dengan pengurus BUMNeg agar mengetahui perkembangan BUMNeg.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Dalam proses pengelolaan BUMNeg, pengurus melakukan bentuk pengawasan terhadap perkembangan-perkembangan usaha yang ada di BUMNeg Samasimalatu ini. Dengan mengawasi unit-unit usaha contohnya mengawasi unit usaha angkutan umum kalau ada yang rusak bisa diperbaiki. Laporan pembukuan juga dilakukan pemerintah Negeri dalam pengawasan BUMNeg. Akan tetapi, BUMNeg belum melakukan pengawasan secara optimal disebabkan karena ada pengurus yang merangkap 2 jabatan sekaligus.

Manajemen BUMNeg Toulatu (Negeri Hatalai)

1) Perencanaan (*Planning*)

BUMNeg Toulatu di Negeri Hatalae Terdapat 4 unit usaha yakni usaha sembako, penyewaan tenda dan kursi, transportasi darat(pickup), ATK dan Fotocopy . Perencanaan dilakukan dengan beberapa proses yakni menetapkan tujuan, membuat prosedur dan membuat program. Perencanaan yang akan dilakukan yaitu mengembangkan lagi unit usaha sembako karena sudah tidak jalan, karena unit usaha sembako mempunyai untung yang besar dan juga rencana dari pemerintah negeri yaitu akan menggantikan pengurus yang lama ke pengurus yang baru

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Setiap kegiatan yang dilakukan dan dijalankan oleh pihak BUMNeg Toulatu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak pengelola BUMNeg. Dengan keikutsertaan dan terlibatnya masyarakat Negeri untuk membangun dan memajukan BUMNeg Toulatu sangat berperan penting dalam perekonomian Negeri serta dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat setempat. Kerjasama yang dilakukan bukan hanya antara pengelola dan masyarakat saja melainkan harus disertai kerjasama oleh pemerintah Negeri. Berdasarkan temuan peneliti, bahwa pengorganisasian dan kerjasama yang dilakukan antara Pengurus BUMNeg Toulatu tidak baik karena hanya 1 orang pengurus yang mengelola unit unit usaha tersebut.

3) Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan merupakan fungsi dari manajemen yang saling berdampingan dengan usaha memberikan bimbingan, arahan, perintah ataupun saran kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dengan dilakukan dengan baik maka tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. BUMNeg Toulatu telah melakukan pembimbingan cukup baik dengan berdiskusi pada saat rapat kerja tentang kendala yang dihadapi dan mencari solusi untuk pemmasalahan yang ada. Rapat kerja dilakukan setiap 2 kali dalam setahun.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Dalam proses pengelolaan BUMNeg, pengurus melakukan bentuk pengawasan terhadap perkembangan-perkembangan usaha yang ada di BUMNeg Toulatu ini. Dengan mengawasi unit-unit usaha yang ada di BUMNeg Toulatu. Laporan pembukuan juga dilakukan pemerintah Negeri dalam pengawasan BUMNeg. Akan tetapi, BUMNeg belum melakukan pengawasan secara optimal disebabkan karena hanya 1 pengurus yang mengelola ke empat unit usaha tersebut.

Problem atau Kendala yang di Hadapi BUMNeg Benteng Raja

Kendala Eksternal

Kendala yang terjadi yaitu tentang kesadaran masyarakat tentang pentingnya unit-unit usaha yang ada di BUMNeg Benteng Raja. Mengingat bahwa BUMNeg Benteng Raja yaitu mempunyai tujuan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Maka dari itu BUMNeg Benteng Raja mengelola unit-unit usaha yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, akan tetapi ada masyarakat yang tidak suka dengan 1 unit usaha yang ada di BUMNeg Benteng Raja yaitu perikanan tangkap (zero) dan akhirnya mereka memutuskan zero itu tanpa ada rasa bersalah.

Problem atau Kendala yang di Hadapi BUMNeg Rajunohitipory**Kendala Eksternal**

Kendala yang terjadi yaitu unit usaha perikanan tangkap yang ada pada BUMNeg Rajunohitipory sudah tidak jalan karena sudah banyak alat tangkap masyarakat yang ada sehingga sudah tidak ada partisipasi lagi dari masyarakat untuk unit usaha tersebut

Problem atau Kendala yang di Hadapi BUMNeg Lesa**Kendala Internal**

Kendala yang terjadi yaitu belum ada pergantian pengurus dari yang lama ke yang baru mengakibatkan BUMNegnya tidak jalan.

Kendala eksternal

Dalam menentukan sikap serta ketertarikan masyarakat terhadap BUMNeg Lesa juga menjadi kendala eksternal. Beberapa masyarakat yang kurang mengetahui tentang adanya BUMNeg Lesa serta masyarakat cenderung tidak mau tau tentang peran dan tujuan BUMNeg Lesa di Negeri Leahari.

Problem atau Kendala yang di Hadapi BUMNeg Amanhuary**Kendala Internal**

Kendala yang dihadapi yaitu masing-masing pengurus mempunyai kesibukan yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan pada saat ingin membersihkan tempat wisata itu hanya terdapat beberapa pengurus saja dan Pengurus BUMNeg Amanhuary ingin menambahkan 1 unit usaha lagi yaitu pom bensin mini tetapi tidak ada lahan yang tepat untuk tempat pom bensin tersebut.

Problem atau Kendala yang di Hadapi BUMNeg Embun**Kendala Internal**

Kendala yang dihadapi yaitu pada kepengurusan BUMNeg Embun ada 2 pengurus yang mengundurkan diri dari kepengurusan dan langsung membuat unit usaha sendiri.

Kendala Eksternal

Kendala yang terjadi yaitu pada unit usaha sembako, sudah tidak jalan dengan baik karena kurangnya minat beli masyarakat karena sudah banyak warung-warung yang menjual sembako di Negeri Ema

Problem atau Kendala yang di Hadapi BUMNeg Samasimalatu**Kendala Internal**

Kendala internal yang dihadapi oleh BUMNeg Samasimalatu yaitu tidak mempunyai kantor BUMNeg selama menjalankan unit usaha sehingga pengurus menyewakan salah 1 rumah pengurus untuk dijadikan kantor BUMNeg samasimalatu. Masih ada pengurus yang merangkap jabatan pada kepengurusan BUMNeg Samasimalatu

Problem atau Kendala yang di Hadapi BUMNeg Toulatu**Kendala Internal**

1. Terbatasnya tenaga kerja juga menjadi kendala internal dalam BUMNeg Toulatu. Hal ini dikarenakan jumlah pengurus yang tersisa dalam kepengurusan BUMNeg Toulatu yaitu 1 orang saja mengakibatkan beberapa unit usaha tidak terkontrol dengan baik
2. Belum ada pergantian pengurus dari pemerintah negeri dan disitu terlihat bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah negeri Hatalae

Kendala Eksternal

1. Pada unit usaha sembako itu sudah tidak jalan dengan baik karena kurangnya minat beli masyarakat, karena masyarakat berfikir bahwa Negeri Hatalae sangat dekat dengan pusat kota jadi masyarakat bisa turun dan berbelanja di kota.
2. Kendala yang ada pada unit usaha mobil *pickup* dengan penyewaan tenda yaitu kurangnya pemasukan karena nanti ada keperluan baru dibutuhkan untuk digunakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut.

Secara keseluruhan, fungsi manajemen yang diterapkan oleh BUMNeg Benteng Raja, BUMNeg Rajunohitipory, BUMNeg Lesa, BUMNeg Amanhuary, BUMNeg Embun, BUMNeg Samasimalatu ,BUMNeg Toulatu yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena manajemen pengelolaan yang berjalan kurang maksimal. Dari ketujuh BUMNeg yang ada di Kecamatan Leitimur selatan yang memenuhi 4 fungsi pengelolaan manajemen BUMNeg yaitu ada pada BUMNeg Amanhuary di Negeri Hukurila karena pada ke 4 fungsi manajemen BUMNeg Amanhuary memiliki perencanaan yang baik untuk mau menambahkan 1 unit usaha lagi, pengorganisasiannya semua pengurus BUMNeg masih lengkap dan semuanya bekerja sesuai bidangnya masing-masing, pengarahan untuk pengurus BUMNeg juga selalu diberikan oleh Raja Negeri Hukurila untuk masalah atau kendala yang sedang dihadapi, Raja Negeri Hukurila juga selalu melakukan pengawasan dan mengontrol kinerja serta laporan keuangan BUMNeg Amanhuary.

Namun, dari ke 7 BUMNeg yang teradapat pada Kecamatan Leitimur Selatan yang ada yang kurang melakukan manajemen pengelelolaan BUMNeg yaitu pada BUMNeg Embun di Negeri Ema karena pada perencanaan BUMNeg Embun masih belum ada rencana kedepan karena pengurus yang lama belum ada langkah maju kedepan jadi Pemerintah Negeri ingin mengganti kepengurusannya, pengorganisasian pada kepengurusan BUMNeg Embun juga sudah banyak yang tidak aktif, dan juga pada BUMNeg Embun sudah lama tidak ada rapat kerja sehingga proses pengarahan dan mencari solusi untuk masalah yang dihadapi tidak ada.

Daftar Pustaka

- Berutu, Budi. R. 2018. "Universitas Medan Universitas Medan Area Area." *Pemutusan Hubungan Kerja*. Vol (1):1–12.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. 2021. "Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan". *Jurnal Pembangunan Perkotaan*. Vol 9(1), 9–14.; <http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP/article/view/91>
- Hutahaean, D. W. S. 2018. *Dasar Manajemen by Dr. Wendy Sepmady Hutahaean, S.E., M.Th.* (p. 4). Ahlimedia Press.
- Shofa, Jayanty Nada. 2021. "Mendes PDTT Akan Tinjau Pengembangan BUMDes Di Maluku." *Www.Beritasatu.Com*. Retrieved July 19, 2022 (<https://www.beritasatu.com/archive/725355/mendes-pdtt-akan-tinjau-pengembangan-bumdes-di-maluku>).
- Stoner. A.F 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suprihanto John. 2014. *Manajemen* (Sutarno (ed.)). GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Wahyudi, D.D, Purnamasari, Hanny, & Gumilar, G.G. 2022. "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa". *Moderat 8* : 45-154.
- Wijaya. (2018), *Manajemen Kualitas Jasa*, Edisi Kedua, Jakarta: PT.Indeks
- Www.Pemkotkotaambon (2017). *Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8*.